

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Huni. Lingkungan hidup menjadi salah satu faktor penentu suatu kota dikatakan layak huni atau tidak. Hal ini disebabkan perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia yang semakin meningkat akibat tingginya tingkat urbanisasi. Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang berakibat kota menjadi lebih padat sebagai hasil dari adanya kenaikan fertilitas penghuni kota maupun tambahan penduduk desa yang berkembang di kota. Ijong et al (2017) menyebutkan efek yang mengikuti perkembangan kota ke arah modernisasi salah satunya memiliki dampak pada arus urbanisasi dan pertambahan penduduk yang memiliki resiko penurunan kualitas lingkungan di daerah perkotaan. Selain itu, Ahmad *et al.* (2012) mengatakan bahwa kebutuhan ruang di perkotaan menjadi masalah yang cukup penting, karena meskipun dengan keterbatasan ruang tetapi permintaan tetap meningkat. Oleh sebab itu isu yang selalu berkembang ini diperlukan sebuah upaya untuk menanggulangi isu tersebut. Isu lingkungan ini masih menjadi topik di dalam penelitian terkait perubahan iklim, *sustainable development*, serta beragam tema lainnya di dunia.

Komponen ekosistem pada kota adalah ruang terbuka hijau atau RTH yang secara signifikan memberikan kontribusi ekologis dalam kehidupan ekonomi dan sosial-budaya (Bradley, 1995; Shafer, 1999). Selanjutnya Fatimah *et al.* (2013)

menyebutkan bahwa RTH menjadi salah satu bagian utama dari pembangunan serta pengelolaan ruang-ruang kota dalam upaya untuk mengendalikan kapasitas dan kualitas ekosistem kotanya dan juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan menjadi bagian yang paling diperhatikan bagi setiap pembangunan sebuah kota maupun daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian-penelitian terkait, selain mengenai pentingnya mengelola lingkungan dengan baik juga terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah membangun kota maupun daerah yang layak menjadi tempat tinggal. Ruang terbuka hijau perkotaan menjadi hal penting untuk kualitas hidup penduduk. Selain itu, kontribusinya terhadap kesehatan manusia dan pengembangan identitas lokal juga merupakan dampak dari hal tersebut. Hal ini sudah banyak diteliti secara global, seperti penelitian yang telah dilakukan Koncijnendijk *et al.* (2013). Selain itu, menghubungkan antara masyarakat dengan lingkungan hidup dapat berpotensi untuk meningkatkan ikatan psikologis dan emosional terhadap kota yang ditinggali (Chen *et al.*, 2003).

Isu lingkungan menjadi bagian yang dekat dengan makhluk hidup. Oleh sebab itu upaya untuk menjadikan lingkungan menjadi lebih baik lagi semakin diperhatikan. Sebuah isu jika tidak dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang buruk bagi sebuah organisasi, kota, atau lainnya. Upaya pengelolaan yang baik menjadi tantangan bagi pemerintahan Indonesia, dikarenakan persebaran masyarakat yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Dengan mencakup masyarakat Indonesia yang sangat banyak dan luas, maka pemerintah

pusat melalui pemerintah kota maupun kabupaten berupaya untuk mengelola lingkungan menjadi lebih maksimal. Oleh sebab itu, ini menjadi pentingnya bagi pemerintah kota atau kabupaten dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

Kota layak huni atau *The Livable City* berdasarkan Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) adalah istilah yang menggambarkan lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan bekerja. Hal ini dipandang baik dari aspek fisik berupa fasilitas perkotaan, infrastruktur, perencanaan tata ruang, lingkungan, dan lain - lain) maupun non – fisik (sosial, hubungan, perekonomian, dan lain – lain). Kajian Kota Layak Huni dilakukan oleh menggunakan indikator yang telah dipaparkan oleh IAP pada setiap survey yang dilakukan. Penilaian yang dilakukan oleh IAP dalam memperoleh tingkatan Kota Layak Huni di Indonesia ini berdasarkan dengan survey yang dilakukan pada masyarakat. Survey yang dilakukan setiap tiga tahun sekali ini memberikan indicator penilaian yang semakin tahun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pada setiap tiga tahun sekali ada kota – kota baru yang mulai melakukan pembenahan dan menjadi Kota Layak Huni.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh IAP dalam memberikan peringkat bagi kota – kota di Indonesia sebagai Kota Layak Huni yang disebut dengan *Most Liveable City Index* (MLCI) terdapat 7 aspek penilaian. Ketujuh aspek tersebut adalah aspek fisik kota, aspek lingkungan, aspek transportasi, aspek fasilitas umum, aspek utilitas, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dari ketujuh aspek tersebut aspek lingkungan menjadi salah satu fokus pada pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini melihat

lingkungan memberikan dampak bagi beberapa aspek lainnya. Beragam sumber kehidupan yang hanya dapat diperoleh dari pentingnya mengelola lingkungan ini menjadikan aspek lingkungan menjadi sangat perlu untuk diperhatikan.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya) yang dapat mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian lingkungan hidup ini menjadi salah satu dasar yang digunakan terkait dengan pentingnya mengelola dan menjaga lingkungan hidup. Upaya mewujudkan hal ini diperlukan sebuah cara atau strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam mengelolah lingkungan hidup di Indonesia.

Tahun 2017 Indonesia memiliki jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 261,89 juta jiwa dan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 267 juta jiwa. Perubahan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia ini mengakibatkan banyak hal mulai dari timbul permasalahan tingginya jumlah sampah, limbah, hingga pada kerusakan keanekaragaman hayati yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam hal tanggung jawab pengelolaan lingkungan agar tidak rusak dan menjadikan setiap kota menjadi Layak Huni. Kerena dampak yang diperoleh jika tidak dapat menjaga maupun mengelola lingkungan dengan baik yaitu terkait

dengan kesehatan lingkungan juga. Oleh sebab itu diperlukan sebuah upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya mengelola lingkungan demi mewujudkan Kota Layak Huni.

Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat luas dengan sebagian besar adalah daerah kepulauan. Hal ini membuat pemerintah pusat memberikan tanggung jawab kepada pemerintah kota untuk mengelola kotanya. Hal ini melihat perkotaan menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Pusat perdagangan sering kali dijumpai di pusat – pusat kota yang ada di Indonesia. Kristarani dan Fajarwati (2015) menyebutkan bahwa kota merupakan pusat dari seluruh kegiatan, pelayanan, dan pemerintahan yang menjadi daya tarik bagi penduduk untuk melakukan urbanisasi. Hal ini yang mengakibatkan urbanisasi menjadi salah satu permasalahan perkotaan yang membuat kota menjadi pilihan dominan bagi penduduk di Indonesia untuk tinggal di kota. Oleh sebab itu kota menjadi bagian utama dalam hal permasalahan tingginya tingkat urbanisasi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di kota ini dapat memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan lingkungan hidup di perkotaan. Sehingga dalam upaya untuk menjaga sekaligus mengelola lingkungan perkotaan yang dapat memberikan dampak buruk bagi Indonesia kedepannya.

Pentingnya mengelola lingkungan bagi pemerintah kota menjadi hal utama dalam perencanaan kegiatan di kota pada setiap tahunnya. Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola lingkungan ini dibuktikan dengan penghargaan nasional maupun internasional dalam bidang lingkungan yang berhasil di raih oleh Kota Surabaya. Penghargaan Nasional tertinggi yang di

peroleh ini tidak hanya sekali tetapi Pemerintah Kota Surabaya berhasil mempertahankan penghargaan ini selama Sembilan tahun berturut - turut. Penghargaan Nasional yang diberikan oleh Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia ini adalah penghargaan Adipura Kencana. Penghargaan ini menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan kepemimpinan pemerintah kota dalam mengelola lingkungan utamanya dalam pengelolaan sampah. Sedangkan, pada penghargaan Internasional terkait lingkungan ini adalah pada tahun 2018 Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan Lee Kwan Yew Award. Penghargaan yang diberikan sebagai kategori *Special Mention* diterima oleh Kota Surabaya. Pada penghargaan Lee Kwan Yew Kota Surabaya bersejajar dengan kota Hamburg di Jerman, Kazan di Rusia, dan Tokyo di Jepang. Kemenangan Kota Surabaya pada penghargaan tersebut dikarenakan keunggulan program pemerintah Kota Surabaya yaitu Kampung Unggulan dan Pahlawan Ekonomi. Kedua program pemerintah Kota Surabaya tersebut merupakan program yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas perkampungan di Kota Surabaya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya ini tidak seolah – olah hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Melainkan, pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemerintah kota. Mustasir *et al.* (2017) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ini dapat memiliki pengaruh kontrol terhadap berbagai inisiatif pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang akan mempengaruhi lingkungannya. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwasannya partisipasi masyarakat ini juga kan dapat mempengaruhi

keberhasilan sebuah pembangunan yang dilakukan. Dalam rangka memperoleh dukungan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan sebuah pendekatan komunikasi kepada masyarakat tersebut. Salah satu pihak yang berkepentingan untuk menciptakan dukungan dan partisipasi masyarakat atas kebijakan pemerintah kota adalah Humas pemerintah kota.

Menurut Jefkins (1992) yang mengatakan bahwa Public Relation (PR) atau Hubungan Masyarakat adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan, salah satunya merujuk pada peningkatan citra. Selain itu, Cutlip dan Center (2006) juga menyebutkan bahwa Humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Humas dalam pemerintahan menjadi bagian penting untuk mengelola inspirasi dan apresiasi yang dibagikan oleh masyarakatnya.

Humas pemerintahan menjadi salah satu lembaga bagian pemerintahan yang membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dengan komunitas lokal atau masyarakat dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik. Ardianto (2011) menjelaskan bahwa tugas Humas pemerintahan adalah menjalankan suatu kegiatan yang terkait dengan kebijakan publik dan pelayanan publik. Contoh kegiatan dari Humas pemerintah pada bidang kebijakan publik adalah memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintah yang terkait dengan

masyarakat. Sedangkan dalam bidang pelayanan publik adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik seperti menyusun birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat agar pemerintah memperoleh citra positif.

Humas pemerintah atau *Government Public Relations* (GPR) yang sering dipahami sebagai penghubung penting antara masyarakat dengan pemerintah, karena sebagai Humas yang memiliki tugas pokok menurut Suprawoto (2018) sebagai fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik, *stakeholder*, serta warga negara atau masyarakat. Selanjutnya, Cutlip *et al.* (2006) menyatakan fungsi Humas pemerintah lebih besar daripada praktik *public relations* yang lain, dimana perbedaannya menekankan pada peran advokasi publik yang dimainkan oleh komunikator pemerintah untuk membuat keputusan pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa Humas berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Tiga prinsip kerja GPR yang diprakarsai oleh *International Public Relations Associations* (IPRA) Humas, yaitu kecepatan dalam menangkap isu publik secara *real time*, mampu menembus mayoritas dan perlawanan masyarakat untuk mengelola opini publik, dan mampu menciptakan makna. Cara kerja GPR adalah untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat, menetapkan seting agenda, sumber informasi yang akurat dan andal. (Sugiyanto *et al.*, 2016).

Ardianto (2011:246) menjelaskan bahwa kegiatan PR (Humas) di dunia Pemerintah harus benar-benar untuk kepentingan rakyat atau publik sehingga seorang pejabat Humas harus mampu menciptakan, membina serta memelihara

hubungan ke dalam dan ke luar. Tugas dari seorang Humas sendiri meliputi dari membangun hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakatnya. Oleh sebab itu mengapa Humas menjadi salah satu bagian penting dalam organisasi Pemerintah. Sebagai salah satu lembaga tertinggi yang mengatur kebijakan masyarakat agar tetap tertib dan terjaga maka pemerintah perlu Humas untuk mengelolah komunikasi tersebut. Agar keseimbangan antara Pemerintah dan masyarakat ini menjadi akhirnya dapat meraih tujuan dari organisasi. Maka dari itu Humas menjadi bagian penting dalam keberhasilan suatu organisasi.

Suprawoto (2018:78) menyebutkan fungsi Humas ini tidak dapat terlepas dari opini publik, hal ini dikarenakan salah satu fungsi Humas adalah menciptakan opini publik yang memiliki kemauan baik dan partisipasi yang baik. Oleh sebab itu, kinerja Humas dalam sebuah organisasi pemerintah dapat membantu dalam menjalankan suatu program pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang ditargetkan oleh pemerintah. Hal ini menjadikan Humas pemerintah juga berperan penting dalam membangun dan memberikan informasi baik secara internal maupun eksternal. Bila dilihat secara eksternal, biasanya Humas berperan memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah, memberikan sanggahan mengenai suatu pemberitaan yang dapat merugikan pemerintah, dan menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai salah satu divisi Humas yang merupakan penghubung antara pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat memiliki tugas penting untuk dapat memberikan seluruh informasi kepada masyarakat dengan baik dan secara keseluruhan.

Kota Surabaya menjadi kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2019 ini menunjukkan jumlah penduduk di Kota Surabaya sebesar 2,9 Juta Jiwa atau sekitar 7% dari jumlah seluruh penduduk di Jawa Timur. Tingginya jumlah penduduk di Kota Surabaya membeirkan tanggung jawab besar bagi pemerintah kota untuk dapat mengelola lingkungan dengan baik. Maharani dan Umilia (2014) menyebutkan bahwa Surabaya dikenal sebagai kota yang kotor, panas, dan berantakan meskipun pada sisi lain juga menawarkan kemewahan ala kota metropolitan. Namun pendapat ini tidak sesuai dengan keadaan Kota Surabaya saat ini. Beragam upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memperbaiki keadaan Kota Surabaya sebelumnya. Hananto (2016) yang menyatakan bahwa perubahan yang dilakukan Kota Surabaya ini tidak hanya sekedar berkat tangan Bu Risma melainkan dengan adanya sinergi antara pemerintah, warga, maupun masyarakat dan didukung dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini serta pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi dan berkelanjutan yang menjadi dasar dalam pembangua Kota Surabaya ini menjadika Kota Surabaya akhirnya berhasil meraih penghargaan Adipura sejak tahun 2006 dan Adipura Kencana sejak tahun 2010 hingga 2018 kemarin. Selain itu, berdasarkan data Pemerintah Kota Surabaya (www.surabaya.go.id) menyebutkan pada tahun 2017 Kota Surabaya juga meraih penghargaan *Global Green City* oleh PBB terkait dengan keberhasilan pembenahan lingkungan.

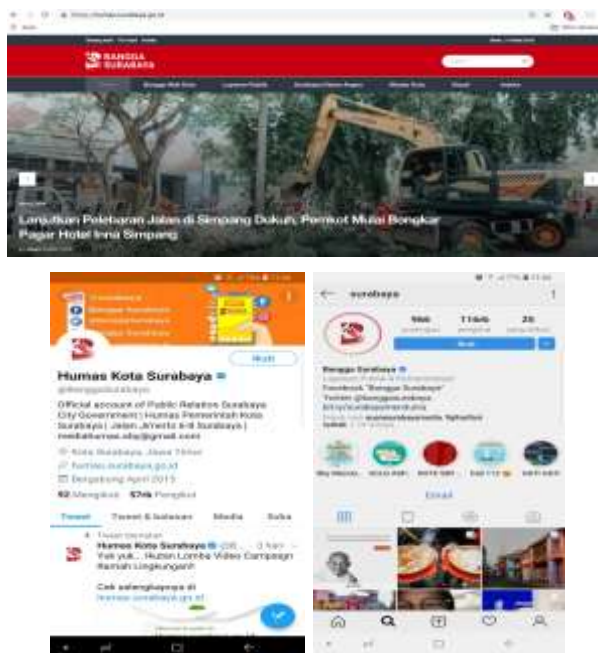
Pembangunan selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya hingga akhirnya pada tahun 2018 Kota Surabaya berhasil dalam meraih penghargaan sebagai Kota Wisata Terbaik mengalahkan Bali. Penghargaan ini diberikan oleh *Yokatta Wonderful Indonesia Tourism 2018*. Setelah penghargaan ini, Bu Risma ingin melakukan inovasi terkait dengan destinasi wisata dengan mengembangkan Wisata Kampung dan Taman. Kemudian, perkembangan Kota Surabaya berikutnya semakin terlihat dalam perolehan penghargaan Internasional yang berhasil pada ajang *Asean Tourism Forum 2018*. Penghargaan *Asean Tourism Forum* ini sebagai kota yang mampu melestarikan pariwisata dengan baik (www.surabaya.go.id).

Penghargaan – penghargaan yang berhasil diterima akhirnya Kota Surabaya tidak lagi dikenal sebagai kota yang panas, kotor, banjir, dan gersang. Selain Kota Pahlawan, Kota Surabaya saat ini lebih dikenal dengan sebutan kota hijau dan kota ramah lingkungan. Kota Surabaya memiliki sisi keunikan tersendiri dibandingkan dengan kota – kota lain di Indonesia. Kota Surabaya memiliki beragam hal yang dapat ditawarkan selain industri dan perekonomian. Adanya wisata gedung bersejarah, wisata taman kota, dan sebagainya ini merupakan bentuk inovasi yang diberikan pemerintah Kota Surabaya dalam membentuk Kota Surabaya. Selain itu, Kota Surabaya juga mengembangkan konsep *Smart City* yang dapat memberikan pandangan baru nantinya tentang Kota Surabaya.

Selain itu, Tri Risma Harini dalam paparannya yang diterbitkan dalam surya.co.id pada 7 Desember 2018 mengatakan bahwa mengatasi masalah lingkungan di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya mengajak partisipasi

masyarakat untuk bekerja bahu membahu dengan pemerintah kota dalam melakukan pengelolaan limbah meski dengan anggaran terbatas. Ini merupakan salah satu kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan memperoleh bantuan warga Surabaya untuk memiliki perhatian lebih kepada pengelolaan sampah, salah satunya sampah rumah tangga yang semakin meningkat. Ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Lingkungan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Huni ini membutuhkan peran masyarakat yang sangat besar di dalamnya. Dalam hal ini Humas Pemerintah Kota Surabaya bersama dinas –dinas terkait mulai merencanakan strategi kemudian untuk dapat mengajak masyarakat lebih memiliki rasa peduli kepada lingkungan sekitarnya. Melalui hal yang paling sederhana, Humas Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan ke masyarakat informasi untuk memperoleh dukungan. Termasuk beragam media sosial yang digunakan oleh Humas Pemerintah Kota Surabaya ini seperti *website*, *instagram*, *facebook*, dan *twitter*. Penggunaan sosial media ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendapatkan dukungan masyarakat terkait kebijakan yang telah ditetapkan.



Gambar 1.1 Media Sosial Humas Pemerintah Kota Surabaya.

Sumber : *Website, Twitter, dan Instagram Humas Surabaya*

Kinerja divisi Humas dalam suatu organisasi pemerintah dapat membantu dalam menjalankan program pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang ditargetkan oleh pemerintah. Suprawoto (2018,:80) menyebutkan bahwa Humas pemerintah berperan penting dalam membangun dan memberikan informasi baik pada internal maupun eksternal organisasi. Secara eksternal, biasanya Humas berperan memberikan informasi berhubungan dengan kebijakan pemerintah, memberikan sanggahan mengenai suatu pemberitaan yang dapat merugikan pemerintah, dan menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Secara internal dalam hal ini Humas pemerintah dapat memberikan informasi terbaru mengenai kebijakan pemerintah hingga pada pengolahan isu – isu internal itu sendiri (Suprawoto, 2018:81). Dalam rangka memberikan informasi ini diperlukan sebuah strategi komunikasi.

Rogers (1982) (dalam Cangara, 2017:64) mengatakan bahwa strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku

manusia, pada skala yang besar upaya ini dilakukan melalui transfer ide – ide baru. Sedangkan pengertian strategi komunikasi lain di perkual lagi oleh Cangara (2017:65) yang menyebutkan sebagai kiat atau taktik yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan perencanaan komunikasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa startegi komunikasi Humas ini dibentuk oleh divisi atau bagian Humas yang dapat menanamkan nilai kepercayaan kepada publik dalam rangka memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan tujuan suatu organisasi.

Pentingnya melakukan strategi komunikasi adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan tujuan organisasi. Cangara (2017:65) menyebutkan bahwa pemilihan strategi komunikasi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan dengan bati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi yang dilakukan dam perencanana ini keliru maka hasil yang diperoleh dapat fatal. Hal ini dapat memperngaruhi kerugian dari segi waktu, tenaga, dan juga materi. Oleh sebab itu dalam sebuah organisasi atau lembaga diperlukannya strategi komunikasi untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengurangi kemungkinan kegagalan yang akan terjadi.

Keberhasilan Kota Surabaya dengan memperoleh beragam penghargaan tersebut tidak begitu saja diraih. Melainkan, beragam uapaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini merupakan hal yang penting dalam meraih suatu keberhasilan. Upaya ini dilihat oleh beberapa pemerintah Kota di Indonesia hingga pemerintahan di Negara lain. Risma dikutip oleh www.kumparan.com mengatakan bahwa “Iya memang Singapura ingin belajar dari Surabaya tentang

membentuk *liveable city* (kota layak huni). Kita jelaskan, bahwa kalau negara maju kan biasanya hanya mendirikan taman biasa. Tapi taman kota kita punya tematik. Ada unsur edukasi dan kesehatan.” Peryataan yang disampaikan ini menyatakan bahwa Kota Surabaya sudah mencapai pada konsep Kota yang *liveable city* atau kota layak huni. Keberhasilan Kota Surabaya dalam mengelolah kotanya ini tidak hanya dipandang oleh kota – kota lain di Indonesia, melainkan kota – kota di Negara lain juga tertarik untuk belajar mengenai pengelolaan kota yang mengusung konsep *Liveable City*. Oleh sebab itu mengapa penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena, tujuan dari Indonesia untuk menjadi Negara yang lebih baik lagi dengan didukung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat agar tetap terjaga.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, maka penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan mendeskripsikan terkait bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mewujudkan Kota Layak Huni.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Strategi Komunikasi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mendukung mewujudkan Kota Layak Huni pada tahun 2019 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan uraian terperinci terkait dengan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mendukung mewujudkan Kota Layak Huni di tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan antara lain adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dalam perkembangan kajian strategi komunikasi serta kajian komunikasi dalam lingkup pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktik *Government Public Relations* atau Humas pemerintah dalam melakukan kegiatan strategi komunikasi sebagai upaya merujudkan Kota Layak Huni. Adapun bagi Humas Pemerintah Kota Surabaya, penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai tolak ukur dalam evaluasi pembentukan strategi komunikasi yang akan datang.